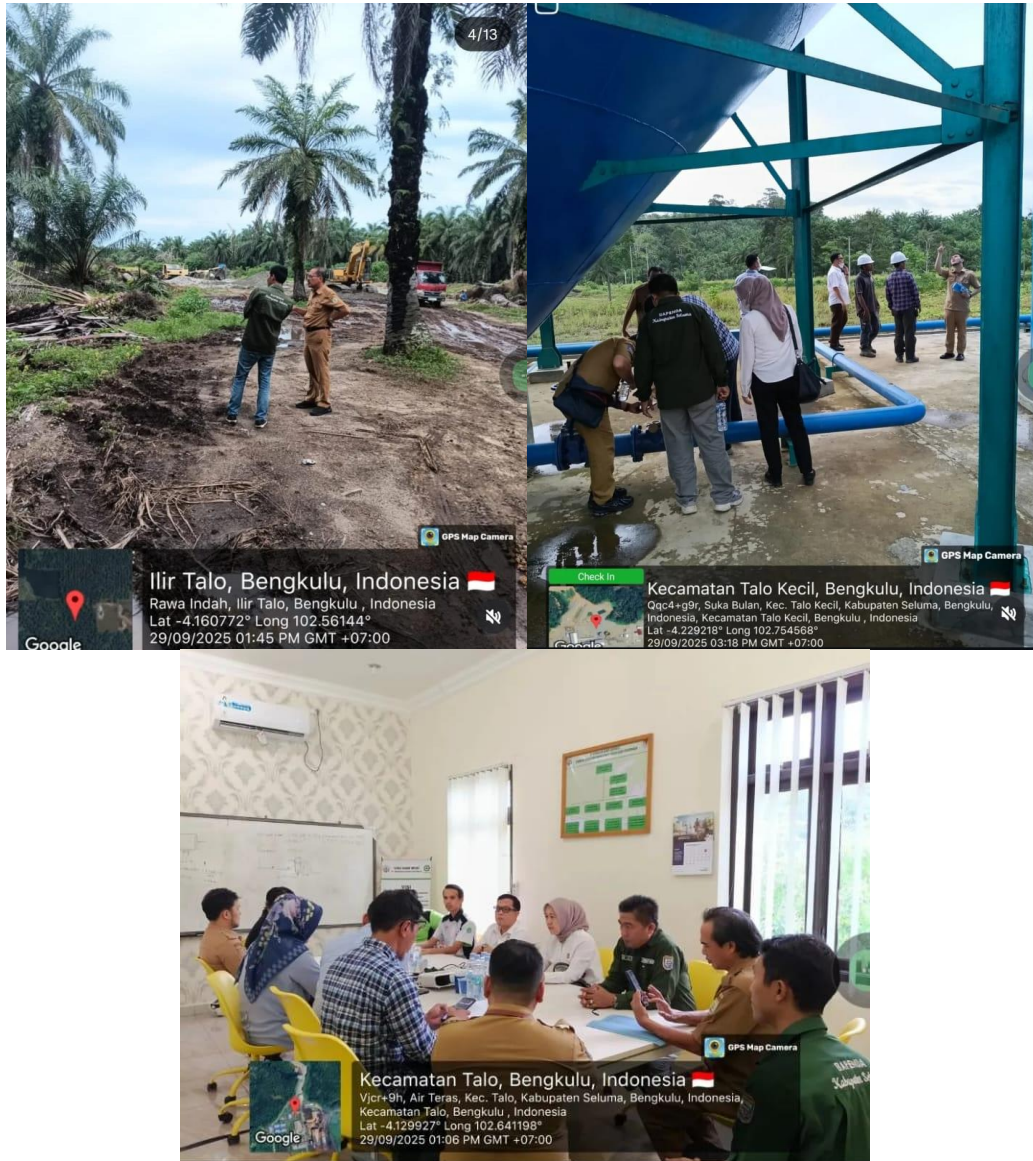


TIM BAPENDA SELUMA MENDAMPINGI KEJATI BENGKULU, BAPENDA PROVINSI BENGKULU, DAN SAMSAT UPTD SELUMA DALAM PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK DI KABUPATEN SELUMA



Seluma, 29 September 2025 - Dalam upaya pengawasan dan penertiban terhadap kepatuhan wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma turut mendampingi kegiatan pemeriksaan lapangan bersama tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Bapenda Provinsi Bengkulu, dan Samsat UPTD Seluma. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 29 September s/d 1 Oktober 2025, dengan fokus pada objek-objek pajak di wilayah Kabupaten Seluma. Dari pihak Bapenda Kabupaten Seluma, tim pendamping terdiri atas, Yudi Heprianto, SE, Sues Nopianto, SH, Aga Saputra, S.Ap, dan Rian Saputra

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor MBLB Kabupaten Seluma. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan dibagi menjadi 2 kelompok. Tim pertama melaksanakan

pemeriksaan di wilayah Kecamatan Seluma Kota hingga Kecamatan Sukaraja, sementara tim kedua bertugas di wilayah Kecamatan Seluma Timur hingga Kecamatan Semidang Alas Maras. Secara keseluruhan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tujuh perusahaan, yang terdiri dari pabrik pengolahan kelapa sawit (PT CPO) serta sejumlah Quarry yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seluma.

Selain melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan, tim juga memberikan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan terkait. Hasil dari kegiatan ini berupa rekomendasi temuan yang disampaikan oleh pihak Kejati Bengkulu kepada Bapenda Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pernyataannya, tim menegaskan bahwa akan ada langkah tegas berupa penutupan sementara terhadap perusahaan yang tidak kooperatif dan tidak menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menegakkan aturan perpajakan dan meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Bapenda Kabupaten Seluma mendukung penuh langkah-langkah penertiban ini demi terciptanya transparansi, kepatuhan pajak, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan